

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus pekerja migran Indonesia (PMI) kompleks dan mendalam. Banyaknya warga Indonesia bekerja di luar negeri berada di sektor perawatan, konstruksi, dan industri. Mereka menghadapi tantangan seperti eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan perlakuan tidak adil. Pelanggaran ini sering diliput oleh media internasional dan diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia. Untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran, kerjasama antara masyarakat, pemerintah, negara tujuan, dan organisasi internasional sangat penting (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2021).

Gambar 1 Berita Suara Merdeka

Mindset Buruk soal Pekerja Migran Indonesia Sudah Harus Ditinggalkan

Setiady Dwi - Rabu, 30 Maret 2022 | 09:12 WIB



Ilustrasi Pekerja Migran. (suaramerdeka.com / dok IST)

Sumber: Suara Merdeka

Banyaknya kisah kurang menyenangkan dan nasib buruk yang dihadapi pekerja migran masih kerap terjadi, BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) mencatat terdapat sekitar 5,3 juta pekerja migran Indonesia yang melakukan pekerjaan secara ilegal dan tidak tercatat dalam pemerintahan negara tempat mereka bekerja (Antara, 2021). Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki mindset buruk terhadap pekerja migran seperti yang dikatakan oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani yang menyebut mindset dan persepsi sebagian masyarakat terhadap pekerja migran masih buruk (Suara Merdeka, 2022), masyarakat menganggap negara belum sepenuhnya melindungi PMI yang bekerja sehingga masih banyaknya kisah kurang menyenangkan yang terjadi.

Bosya Fitra Perdana, 2023

PERAN HUMAS BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN CALON PEKERJA MIGRAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Komunikasi
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

BP2MI bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan untuk pelayanan dan keamanan angkatan kerja migran Indonesia, BP2MI memainkan peran penting dalam masalah ini. BP2MI memiliki tugas untuk menerapkan kebijakan yang menyeluruh dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan organisasi akan sangat membantu dalam memperbaiki kembali kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dan keamanan pekerja migran. Masih banyak sikap negatif terhadap pekerja migran, meskipun faktanya masyarakat umumnya tidak menyadari upaya yang dilakukan BP2MI dalam mempersiapkan dan melindungi karyawan migran. Humas BP2MI bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang organisasi dan layanannya kepada masyarakat umum untuk membangun kepercayaan publik terhadap organisasi dan tenaga kerja migrannya. Peran dan tanggung jawab BP2MI yang diamanatkan harus dikomunikasikan kepada publik dan dilaksanakan secara keseluruhan.

Peran Humas menjadi penting dikarenakan menjadi tombak utama dalam menciptakan citra organisasi itu sendiri. Tujuan dari hal ini adalah untuk memperjelas kebijakan politik yang diterapkan kepada masyarakat, sehingga dapat saling memahami dan menciptakan hubungan yang baik (Drs. S. K. Bonar, 1993: 12). Terdapat tiga pengertian mengenai humas; pertama, memberikan informasi atau penjelasan kepada masyarakat, kedua, melakukan persuasi secara langsung terhadap masyarakat untuk merubah sikap dan tindakan, dan ketiga, mengintegrasikan sikap dan tindakan antara perusahaan dengan masyarakat serta sebaliknya (F Rachmadi, 1992: 21).

Menurut BP2MI, mayoritas dari mereka lulusan SMA. Negara akan menempatkan lebih banyak fokus pada sektor formal, dan mengurangi sektor domestik dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini untuk lebih mengarahkan mereka ke bidang yang sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Untuk program *government to government (Government to Government)*, ada beberapa negara seperti Korea Selatan yang menawarkan gaji sebesar Rp 20-30 juta, Jepang sebesar Rp 22-30 juta, dan Jerman yang akan mulai menawarkan gaji sebesar Rp 34-40 juta per bulan pada tahun ini. Benny menjelaskan hal ini di Bandara Soekarno-Hatta pada tengah malam hari Senin (18/7/2022). Ega Alfreda. (2022, Juli 19). Kepala BP2MI Berberkan Besaran Gaji Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, Negara Ini Paling Besar. (Tribun.com, 2022)

BP2MI memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan antara tenaga kerja migran Indonesia dengan lapangan kerja di luar negeri. Melalui kegiatan penempatan, BP2MI bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memfasilitasi proses rekrutmen, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja ke berbagai sektor industri. BP2MI juga berperan dalam menjaga kualitas dan kelayakan calon tenaga kerja migran, serta melindungi hak-hak mereka di tempat kerja. Melakukan koordinasi dan pengawasan yang efektif, BP2MI membantu menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan bagi tenaga kerja migran Indonesia, sehingga berkontribusi pada pengembangan ekonomi baik di dalam negeri maupun di negara tujuan.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki reputasi yang kompleks dan bervariasi. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi pekerja migran Indonesia, BP2MI telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan mereka. Mereka telah membantu pekerja migran dalam proses penempatan, memberikan informasi dan pelatihan sebelum keberangkatan, serta mengawasi kondisi kerja di negara tujuan. Namun, di sisi lain, ada juga laporan dan kritik terkait kurangnya transparansi, koordinasi yang kurang efektif dengan lembaga lain, dan respons yang lamban terhadap pengaduan atau pelanggaran yang dilaporkan. Untuk memperbaiki reputasinya, BP2MI perlu terus memperkuat kapasitasnya, meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dan meningkatkan mekanisme pengawasan serta respons terhadap masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia.

Ada kemungkinan bahwa beberapa Pekerja Migran Indonesia masih mengirim atau membawa pulang hanya sejumlah kecil uang yang diperoleh di luar negeri karena mereka tidak dapat meningkatkan ekonomi keluarga saat mereka pergi. Tingkat perceraian yang lebih tinggi mungkin merupakan salah satu konsekuensi dari adanya pekerja migran yang besar, dan kualitas hidup bagi mereka yang ditinggalkan mungkin menderita sebagai akibatnya. Tingginya jumlah orang yang memilih untuk menjadi pekerja migran memiliki banyak konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti peningkatan tingkat perceraian dan situasi ekonomi yang memburuk bagi keluarga yang mereka tinggalkan, serta terjadinya berbagai kejadian yang tidak diinginkan yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia, seperti tindakan kekerasan dan perdagangan ilegal. (Zulfikar & Iqbal Sultan, 2017)

Berbagai aturan digunakan oleh organisasi untuk mengatasi ketidakjelasan informasi. Proses menjernihkan kesalahpahaman atau mempersempit ambiguitas bisa menjadi proses yang sulit. Organisasi adalah prosedur yang biasanya tetap ada, selama proses pengorganisasian secara keseluruhan. Tujuan pengorganisasian ini adalah agar informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar tidak mengalami ketidakjelasan informasi. Adapun penelitian terdahulu yang dapat menjadi bahan perbandingan dan acuan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmad Handin Setya Purwo (2020) dalam Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP) Volume 8, penelitiannya yang berjudul **“Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur”**. Metodologi kualitatif dan pendekatan deskriptif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Humas BPSDM dalam meningkatkan reputasi Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan temuan penelitian, dapat dikatakan bahwa Bagian Humas BPSDM Provinsi Jawa Timur telah berhasil memenuhi tanggung jawabnya sebagai fasilitator komunikasi dengan membuat rencana untuk meningkatkan kinerja semua orang dan menginformasikan kepada publik dengan tetap mematuhi hukum. Humas BPSDM Provinsi Jawa Timur telah bekerja sama untuk mengatasi permasalahan, khususnya opini publik yang meningkat.

Alur kerja Humas BPSDM Provinsi Jawa Timur adalah pertama-tama menemukan keluhan atau permasalahan masyarakat tentang pelatihan, kemudian dirapatkan dengan pimpinan, dan terakhir hanya fokus pada rencana masa depan. Dalam hal menyebarkan berita, BPSDM bergantung pada bentuk komunikasi tradisional dan modern untuk membangun kredibilitas dengan industri PR, BPSDM Provinsi Jawa Timur mengutamakan kepuasan pelanggan dan menumbuhkan lingkungan dimana karyawan memperlakukan satu sama lain dengan saling menghormati.

Penelitian yang dilakukan oleh Danisa Maharani dan Sutirman (2017) dalam Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang berjudul **“Peran Humas dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta”**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fungsi humas di Dinas Informasi dan Sandi Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan sebaik

mungkin kepada masyarakat setempat serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Menurut hasil penelitian, Humas berperan sebagai penghubung antara organisasi dan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan, kegiatan, laporan keuangan, wabah penyakit, prestasi, informasi darurat bencana, dan sebagainya, melalui media tidak langsung seperti situs web, Facebook, SMS gateway, UPIK, email, dan telepon. Untuk memperoleh informasi yang akan dipublikasikan, Humas bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga berperan sebagai pembina hubungan antar organisasi.

Kegiatan proses pencarian fakta dilakukan melalui pengumpulan masukan dari publik atau media massa, yang merupakan bagian penting dalam mendukung manajemen organisasi untuk kehumasan. Setelah memperoleh temuan-temuan ini, departemen hubungan masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil langkah maju dengan menginisiasi strategi komunikasi yang komprehensif. Strategi ini mencakup penyebaran temuan informasi kepada petinggi kota guna dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan akurat.

Upaya membangun citra positif bagi perusahaan, terdapat beberapa kontributor yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah melalui distribusi informasi atau pemberian layanan lain secara gratis kepada publik. Tindakan ini tidak hanya dapat membantu meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga memperkuat hubungan dan keterikatan antara perusahaan dengan masyarakat.

Langkah-langkah ini yang dilakukan departemen hubungan masyarakat tidak hanya menjadi pilar penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk citra dan nama baik perusahaan dalam pandangan masyarakat secara keseluruhan.

Humas memberikan pelayanan kepada masyarakat, Humas di Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta mengalami beberapa kendala, di antaranya adalah keterbatasan SDM yang tersedia, kurangnya koordinasi dengan OPD terkait, lama waktu penyelesaian pengaduan yang harus diselesaikan, dan kurangnya komunikasi dua arah yang menyulitkan penerimaan umpan balik dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Novian Anata Putra dan Ema Oktoviani R (2020) dalam Jurnal Pekomnas Volume 5 No.2 yang berjudul **“Peran Tim Humas: Studi Kasus Pengelolaan Citra Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Era Digital”**.

Penelitian deskriptif ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas di Dinas Informasi dan Sandi Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan terbaik kepada lingkungan dan kesulitan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini adalah adanya kerja sama yang harmonis antara ketiga tim pengelola tersebut, yang terkadang bekerja secara independen, terkadang tumpang tindih, dan terkadang berkolaborasi. Mereka berkonsentrasi untuk melakukan tanggung jawab dan peran mereka yang berbeda dengan kemampuan terbaik mereka, dan hasil langsung dan tidak langsung dari upaya mereka bertemu untuk meningkatkan citra dan popularitas Gubernur. Isi satu sama lain dengan kemampuan terbaik masing-masing. Ketika membahas koordinasi pekerjaan ketiganya, jelas bahwa mereka saling melengkapi dalam mencapai kriteria berbeda yang ditetapkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat yang hebat.

Penting untuk berhasil mengelola citra kepala daerah, kepribadian Ganjar Pranowo perlu diperhatikan karena ketiga tim yang sangat efektif ini adalah hasil dari pemikiran dan inisiatifnya. Misalnya, pemerintahan Ganjar Pranowo melihat pembentukan Tim Ruang Situasi dan Tim Puri Gedeh, yang tidak ada di bawah gubernur sebelumnya. Ganjar Pranowo juga membentuk bagian kehumasan baru di bawah sekretaris daerah sebagai komponen kehumasan, meskipun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 14 tahun 2016 menetapkan bahwa Bagian Humas pemerintah daerah harus berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Tim Puri Gedeh, Tim Situation Room, dan kemajuan image management mungkin tidak akan terjadi tanpa Ganjar Pranowo.

Temuan baru yang penting telah muncul, yaitu Humas pemerintah daerah tidak hanya mengontrol persepsi publik tentang pemimpin daerah, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk refleksi dalam industri Humas secara keseluruhan. Dalam dunia yang ideal, departemen hubungan masyarakat pemerintah akan bertanggung jawab untuk menangani masalah yang berkaitan dengan menjaga persepsi positif publik terhadap pemerintah. Ketika tugas Tim Situation Room digulirkan menjadi tugas tim humas pemerintah, tidak perlu lagi Tim Puri Gedeh yang terpisah. Jika departemen hubungan masyarakat pemerintah dapat menangani semua kebutuhan manajemen citra pemimpin daerah, maka para pemimpin tersebut tidak perlu mengeluarkan uang mereka

sendiri untuk masalah tersebut. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi para profesional kehumasan yang bekerja untuk pemerintah.

Maka dari itu peran Humas BP2MI dalam membangun kepercayaan calon pekerja migran sangat diharapkan dapat mengembalikan mindset dan juga trust, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan pengamatan lebih dalam, sehingga berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian yang berjudul “**PERAN HUMAS BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN CALON PEKERJA MIGRAN**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dengan mempertimbangkan konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat perhatian terhadap permasalahan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pekerja migran. Oleh karena itu, rumusan masalah yang dihasilkan adalah:

1. Bagaimana peran Humas BP2MI dalam membangun kepercayaan calon pekerja migran?
2. Apa saja langkah yang telah dilakukan Humas dalam membangun reputasi BP2MI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembuatan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1.3.1 Tujuan Praktis

Memperluas pengetahuan peneliti dan sebagai masukan juga pertimbangan bagi Humas BP2MI dalam membangun kepercayaan calon pekerja migran.

1.3.2 Tujuan Teoritis

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan teori informasi organisasi untuk mengetahui peran Humas BP2MI dalam membangun kepercayaan calon pekerja migran

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk Humas BP2MI dalam membangun kepercayaan calon pekerja migran.

2. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan mengenai peran Humas BP2MI dalam membangun kepercayaan calon pekerja migran.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini telah dirancang secara sistematis oleh peneliti untuk mempermudah pelaksanaan penelitian melalui kerangka penulisan yang terstruktur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan terkait peran Humas BP2MI dalam membangun kepercayaan calon pekerja migran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu dengan topik terkait humas, peran humas, dan reputasi dalam organisasi. Teori penelitian berupa Teori Informasi Organisasi yang relevan dengan latar belakang serta objek penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada metodologi penelitian, tentunya diuraikan perihal metode yang dipakai dalam penelitian, pendekatan penelitian, dan bentuk penelitian. Selain itu, penentuan informan, waktu dan tempat penelitian dijelaskan dalam bab ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis untuk memberikan jawaban-jawaban atas masalah penelitian, dan merupakan ajang kemampuan Penulis dalam mengurus juga memecahkan masalah yang sudah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan akan sarana Penulis dalam mengekspresikan isu-isu yang diteliti berkaitan dengan skripsi dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi referensi pendukung dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan referensi lainnya dengan menggunakan APA style dari Mendeley.

LAMPIRAN

Berisi data-data pendukung untuk penelitian berupa hasil wawancara dan riwayat penulis.